

**PARTISIPASI DALAM KELEMBAGAAN KOLABORASI PENGELOLAAN
WISATA PANTAI LOMBANG DI KABUPATEN SUMENEP
PARTICIPATION IN COLLABORATIVE INSTITUTIONS FOR LOMBANG
BEACH TOURISM MANAGEMENT IN SUMENEP REGENCY**

Oleh:

Fara Nurul Fajariyah¹, Rillia Aisyah Haris²
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja
E-mail: Faranurull5@gmail.com

Abstrak

The Regional Government as the manager of Lombang Beach tourism always tries to meet the needs of tourists. However, the facts on the ground are that there are still many complaints from the public who think that Lombang Beach tourism lacks novelty because the government is considered limited in its ability to manage attractive tourist attractions, so there is a need for collaboration with several parties to support the development of Lombang Beach tourism. Participation in Collaborative Governance institutional design is used to see opportunities for stakeholder participation to take part in tourism management on Lombang Beach. This research aims to describe Collaborative Governance in Lombang Beach tourism management in Sumenep Regency. This study used descriptive qualitative method. The focus in this research refers to the theory of Ansell and Gash (2007) that in Collaborative Governance there are institutional design dimensions consisting of: participation opportunities, formed forums, clear rules, transparency in collaboration. Data collection through observation, interviews and documentation.

Keywords: *Management, Tourism, Stakeholders, Collaborative Governance, LombangBeach*

Abstrak

Pemerintah Daerah sebagai pengelola wisata Pantai Lombang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhan wisatawan. Namun, fakta di lapangan masih banyak keluhan masyarakat yang menganggap wisata Pantai Lombang kurang ada kebaruan karena pemerintah dinilai terbatas dalam kemampuan mengelola objek wisata yang menarik sehingga perlu adanya kolaborasi dengan beberapa pihak dalam mendukung pengembangan wisata Pantai Lombang. Partisipasi dalam Desain kelembagaan *Collaborative Governance* digunakan untuk melihat kesempatan partisipasi *Stakeholders* untuk ikut andil dalam pengelolaan wisata di Pantai Lombang. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan *Collaborative Governance* dalam Pengelolaan wisata Pantai Lombang di Kabupaten Sumenep. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Fokus dalam penelitian ini mengacu pada teori Ansell dan Gash (2007) bahwa dalam *Collaborative Governance* terdapat dimensi desain kelembagaan terdiri dari: kesempatan partisipasi, forum yang terbentuk, aturan yang jelas, transparansi dalam kolaborasi. Pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Kata Kunci: *Pengelolaan, Wisata, Stakeholders, Collaborative Governance, Pantai Lombang*

1. PENDAHULUAN

Pariwisata menjadi salah satu keunggulan sektor industri di Indonesia yang dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menjelaskan bahwa Indonesia masih terus berupaya mengoptimalkan pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dengan segala potensi yang dimiliki. Adapun potensi tersebut berupa destinasi pariwisata yang menjadi inti utama pembangunan pariwisata.

Pariwisata dalam pembangunan ialah satu hal potensial yang perlu untuk selalu dikembangkan. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki suatu daerah menjadi sebuah langkah dalam membangun pariwisata daerah. Pembangunan pariwisata tersebut menjadi suatu hal yang berjangka Panjang, sehingga membutuhkan sebuah produktivitas dari sumber daya manusianya dan inovasi-inovasi yang diperlukan dalam mengembangkan pariwisata yang berkelanjutan.

Adapun tujuh isu permasalahan nasional yang menjadi kendala di sektor pariwisata yang disebutkan oleh Lembaga Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

dalam membangun pariwisata yang berkualitas di Indonesia, diantaranya: masih rendahnya kualitas pengelolaan destinasi wisata, pelayanan pariwisata yang dinilai kurang prima, menurunnya kualitas lingkungan wisata, kapasitas sumber daya manusia di dalam sektor pariwisata yang masih tergolong rendah, keterbatasan aksesibilitas udara, darat, dan laut serta kurangnya investasi oleh para investor yang menanamkan modalnya di sektor pariwisata dan juga masih minimnya kesiapsiagaan terhadap bencana (Nashih Nasrullah, 2023).

Permasalahan nasional itu memerlukan kontribusi kerja sama dari berbagai pihak, agar kegiatan pariwisata dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan nasional sehingga prinsip tata kelola pembangunan kepariwisataan yang kolaboratif diperlukan untuk menunjang keberlanjutan kepariwisataan (Matthoriq et al., 2021). Adanya keterbatasan yang memerlukan kerjasama dalam mengelola kepariwisataan tersebut menjadikan Collaborative Governance penting untuk dilakukan.

Topik yang masih menjadi permasalahan yaitu terkait pengelolaan wisata di Kabupaten

Sumenep yang masih belum maksimal, khususnya di wisata pesisir yang menjadi icon Sumenep. Rendahnya perkembangan yang dilakukan pemerintah dalam mengelola potensi wisata yang ada, membuat kurangnya daya tarik masyarakat sehingga pengunjung wisata masih banyak dari wisatawan lokal itu sendiri. Salah satunya permasalahan pengelolaan wisata di Pantai Lombang.

Pantai yang dikelola oleh pemerintah daerah ini dirasa tidak ada perkembangan yang signifikan dari tahun ke tahunnya. Dari hasil observasi awal, ditemukan banyak pengunjung wisata yang mengeluhkan permasalahan fasilitas disana baik akses jalan yang rusak karena tidak ada perubahan sejak dulu, dan infrastruktur yang kurang dirawat, serta kurangnya pembaruan sarana prasarana pendukung di area pantai. Sedangkan potensi disana berupa suguhan pohon cemara udang yang besar dan rindang yang tidak banyak ditemukan di Pantai Nusantara, serta juga pasir putihnya yang bersih, dan ombak yang tidak telalu besar.

Banyaknya masalah yang menjadi keluhan masyarakat pada wisata Pantai Lombang juga dinilai karena adanya keterbatasan dana dalam melakukan pengembangan di area

pantai karena tidak adanya sumbangsih investor dalam mendukung ketercapaian fasilitas yang memadai, dan juga keterbatasan dalam kemampuan tata kelola pantai yang menarik. Belum tercapainya kolaborasi yang terarah menyebabkan permasalahan di Pantai Lombang masih terus saja diperbincangkan sejak dulu sehingga pengelolaan wisata Pantai Lombang membutuhkan kolaborasi dengan beberapa pihak secara terencana dan terarah untuk dapat menggerakkan partisipasi yang diantaranya yaitu aktor bisnis, pemerintah, masyarakat, dan pokdarwis (Haris et al., 2022).

Berdasarkan hasil observasi awal, pengelolaan wisata di Pantai Lombang melakukan kontrak kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola wisata Pantai Lombang di hari-hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri, dan pihak tersebut terbentuk dari beberapa komunitas masyarakat setempat yang dikenal dengan “Lombang Bersatu” atau disebut juga FMWPL (Forum Masyarakat Wisata Pantai Lombang). Pengelolaan oleh pihak ketiga tersebut bersifat profit oriented. Dan Komunitas Lombang Bersatu tersebut menjadi stakeholders yang terlibat dalam kolaborasi

pengelolaan wisata Pantai Lombang saat ini.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penting untuk melihat upaya yang dilakukan agar pengelolaan wisata Pantai Lombang itu dapat berjalan maksimal dengan melalui pendekatan Partisipasi dalam desain kelembagaan sebagai dimensi dari *Collaborative Governance*. Maka penulis tertarik membuat penelitian dengan judul “Partisipasi dalam Kelembagaan dalam Kolaborasi Pengelolaan Wisata Pantai Lombang di Kabupaten Sumenep”.

2. TINJAUAN TEORITIS

Pengembangan Paradigma dalam Administrasi Publik

Menurut (Antar et al., 2022) terdapat 6 fase perkembangan paradigma dalam administrasi publik yaitu *paradigma Old Public Administration, New Public Management, New Public Service, New Public Administration, Governance, Collaborative Governance*.

Konsep dan Pengertian *Collaborative Governance*

Collaborative Governance atau dikenal juga dengan Tata Kelola Kolaboratif merupakan perubahan dari *Government* ke *Governance*. Dimana perubahan ini lebih memfokuskan pada sisi administrasi publik sedangkan

Government lebih mengarah pada institusi pemerintah, berbeda dengan *Governance* lebih menekankan pada keterlibatan kelompok diluar pemerintah, dalam hal ini pemangku kepentingan dan masyarakat (Molla et al., 2021). Konsep *Collaborative Governance*, dalam penerapannya pada suatu kebijakan atau pelaksanaan program, pihak pemerintah tidak selalu memfokuskan pada kemampuan internal yang dimiliki akan tetapi pemerintah dapat bekerjasama dengan berbagai pihak antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Hal ini karena terdapatnya keterbatasan kemampuan, sumberdaya ataupun jaringan sehingga mendorong pemerintah dalam bentuk kerjasama kolaboratif untuk mencapai kebijakan dan tujuan program (Tol et al., 2023).

Dimensi *Collaborative Governance*

Ansell dan Gash dalam (Astuti, 2020), menyebutkan 4 (empat) dimensi utama dalam *Collaborative Governance* yakni terdiri:

1) Kondisi Awal

Kondisi awal mempengaruhi sebelum proses kolaborasi terjadi, terdapat kondisi dimana dapat menjadi pendukung ataupun penghambat kerjasama antara pemangku kepentingan, dan antara

lembaga/organisasi dengan pemangku kepentingan.

2) Desain Kelembagaan

Desain kelembagaan merujuk pada bagaimana aturan dasar dalam berkolaborasi, hal ini menjadi sangat penting karena menjadi sebuah legitimasi secara prosedur dalam proses kolaborasi. Hal yang ditekankan dalam desain kelembagaan ini adalah bagaimana aturan main dalam ikut berpartisipasi dalam kolaborasi, bagaimana forum yang dibentuk, bentuk aturan pelaksanaan yang jelas serta bagaimana adanya transparansi dalam proses pelaksanaan kolaborasi.

3) Kepemimpinan

Kepemimpinan yang kuat yakni dihormati dan dipercaya oleh semua pemangku kepentingan akan sangat dibutuhkan dalam sebuah kolaborasi karena akan lebih mungkin kolaborasi akan berhasil. Kepemimpinan yang kuat ini biasanya muncul dari komunitas para pemangku kepentingan itu sendiri.

4) Proses Kolaboratif

Proses kolaboratif yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Dialog tatap muka (*face-to-face dialogue*)
- b. Membangun kepercayaan (*trust building*)

- c. Komitmen dalam proses kolaborasi (*the development of commitment*)
- d. Pemahaman bersama (*shared understanding*)
- e. Hasil antara (*Intermediate Outcomes*)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Peneliti menggunakan sumber primer dan sumber sekunder untuk memperoleh informasi maupun data dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partisipasi dalam kolaborasi artinya memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada pihak-pihak untuk ikut andil dalam kolaborasi. UPT Destinasi Wisata selaku bagian dari (Disbudporapar) Dinas Kebudayaan, Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata telah memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan yang ingin ikut andil bekerjasama dalam pengelolaan Pantai Lombang. Pemerintah sudah membuka ruang kepada siapa saja untuk dapat mengajukan proposal kegiatan yang akan diadakan dalam mendukung pengelolaan kegiatan wisata di Pantai Lombang. pengelolaan wisata Pantai

Lombang masih menuai kritikan dimana pemerintah dinilai kurang efektif dalam melakukan tata kelola sebelumnya sehingga pengelolaan wisata saat ini dilakukan dengan kolaborasi antara pihak pemerintah dan pihak pengelola ketiga. Hal ini dikuatkan oleh Ansel dan Gash (2007) bahwa tujuan utama adanya tata kelola kolaboratif/ kolaborasi adalah untuk mengembangkan pendekatan kontinjensi terhadap kolaborasi yang dapat menyoroti kondisi dimana tata kelola kolaboratif akan lebih atau kurang efektif sebagai solusi.

Adapun lembaga Pemerintah sudah melibatkan beberapa *stakeholders* dalam pengelolaan wisata meskipun belum semua unsur ada didalamnya. *Stakeholders* tersebut terdiri dari Pemerintah, komunitas swasta (pokdarwis, pemuda desa) dan dukungan dari masyarakat setempat. Peneliti menemukan Pemerintah masih belum melibatkan unsur bisnis dalam pengelolaan wisata seperti Investor, Sponsor dan lain sebagainya. Unsur bisnis yang ada berupa pangkalan UMKM yang hal itu juga dibawah kendali Pemerintah Daerah sendiri.

Pemerintah selaku pelaku utama yang mempunyai kewenangan tertinggi dalam hal pengelolaan destinasi daerah

mempunyai kewajiban menjaga aset daerah dan melakukan kerjasama dengan *Stakeholders* untuk mendukung pencapaian pembangunan pariwisata. Berdasarkan hal tersebut didukung oleh Peraturan Bupati Sumenep Nomor 33 Tahun 2022 bahwasanya pada bidang pariwisata, pemerintah mempunyai tugas melaksanakan urusan pengembangan destinasi pariwisata, pengendalian dan pengawasan usaha pariwisata serta pemberdayaan sumber daya pariwisata.

UPT Destinasi Wisata Pantai Lombang selaku pihak yang diberi tanggung jawab oleh Kepala Dinas untuk dapat mengelola langsung dan selalu melakukan pengontrolan pada wisata Pantai Lombang ini menjadi pihak yang dapat menentukan dan melakukan rencanapengembangan di Pantai Lombang. Dan sekarang ini UPTD Pantai Lombang sudah bekerjasama sama dengan pokdarwis untuk membuat rangkaian acara menarik untuk pengunjung sebagai kegiatan wisata yang dijadikan Program Event Tahunan yang termasuk di dalam *Calender Event* Sumenep. Pokdarwis Pantai Lombang dibentuk atas usulan masyarakat dalam rangka melestarikan daya tarik wisata di daerahnya sehingga peran pokdarwis penting dalam

memberikan kontribusi pengembangan pariwisata di Desa Lombang.

Partisipasi dalam pengelolaan wisata Pantai Lombang juga melibatkan beberapa anggota Pemuda Desa Lombang. Pemuda Desa ini sering disebut sebagai Karang Taruna. Anggota Pemuda Desa lombang terlibat dalam kerjasama pengelolaan wisata karena melihat usia pemuda desa menjadi usia produktif yang dapat membantu pengembangan wisata Pantai Lombang. Adapun partisipasi oleh beberapa *Stakeholders* tersebut juga membantu pemerintah melibatkan beberapa pihak yang harus ada dalam program hiburan yang diadakan seperti Perizinan MPP, Kepolisian, Polair Kalianget, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Puskesmas, Koramil Desa.

Selanjutnya, aktor masyarakat disini adalah masyarakat setempat di sekitar wilayah area wisata Pantai Lombang. Unsur masyarakat berperan penting untuk mendukung keberlanjutan wisata sesuai yang berdasarkan pada Undang-Undang Pariwisata Nomor 10 Tahun 2009 bahwasanya pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah

daerah.

Adapun pernyataan yang diutarakan oleh para pihak dalam hal partisipasi *Stakeholders* muncul atas dasar beberapa alasan yaitu, karena kepedulian terhadap keberlanjutan wisata, mempertahankan potensi wisata berupa pohon cemara udang dan juga untuk dapat bekerja sama dalam menanamkan modal serta mendapatkan keuntungan. Partisipasi para *Stakeholders* berawal dari suka relawan hingga sampai menjadi mitra pemerintah dalam kerjasama di pariwisata. Dikuatkan oleh (Syaiful La Ode Islamy H., 2018) bahwasanya partisipasi dalam *Collaborative Governance* melibatkan beberapa unsur level masyarakat yang dibangun atas dasar kesetaraan peran, dan para aktor kolaborasi terlibat langsung dalam pengambilan keputusan.

Pokdarwis Pantai Lombang sudah berperan membantu pemerintah dalam membuat program event wisata tahunan. Pokdarwis diberi kepercayaan untuk ikut menggerakkan kegiatan wisata agar dapat tetap menjaga keeksian destinasi wisata Pantai Lombang kedepannya. Pemuda Desa atau yang disebut juga Karang Taruna sudah berperan dalam mengajak masyarakat untuk ikut andil terhadap

wisata daerah dan Karang Taruna menjadi pihak yang mengkomunikasikan informasi wisata kepada para lembaga yang dilibatkan saat event wisata diselenggarakan seperti Satpol PP, Puskesmas, Koramil Desa, Kepolisian, Polair Kalianget, Perizinan MPP dan Dinas Perhubungan.

Sedangkan peran masyarakat dalam pengelolaan wisata di Pantai Lombang sudah cukup memiliki antusias yang tinggi karena banyak masyarakat yang turut membantu secara sukarela untuk mendukung keberlanjutan wisata Pantai Lombang. Beberapa peran Stakeholders tersebut sesuai dengan (Haris et al., 2023) bahwa keberhasilan kolaborasi juga ditentukan oleh keterampilan para pemangku kepentingan dalam mendelegasikan wewenang dan partisipasi masyarakat sehingga para aktor kolaborasi sudah saling memberikan manfaat berupa kemampuannya masing-masing di dalam pengelolaan wisata.

Kendala yang ditemukan dalam partisipasi ini yaitu peran pemerintah masih kurang fokus menyusun kerjasama yang luas dengan beberapa pihak diluar pemerintahan seperti pihak bisnis ataupun pihak lain yang dapat mendukung pengembangan wisata di Pantai Lombang. Dan Pemerintah

masih perlu melakukan pemberdayaan terhadap beberapa potensi masyarakat seperti membuat souvenir ataupun UMKM khas Desa Lombang agar potensi tersebut dapat memiliki legalitas dan dilihat oleh wisatawan luar.

4. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis sebelumnya, dapat diketahui bahwa partisipasi dalam pengelolaan wisata Pantai Lombang suda melibatkan Lembaga Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Pemerintah sudah mengupayakan pembangunan pariwisata dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan tersebut. Namun, pihak diluar pemerintahan lebih memiliki sinergitas tinggi terhadap kemajuan wisata di Pantai Lombang. Dan pemerintah belum melibatkan pihak bisnis dalam pengelolaan wisata.

Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian yang telah dipaparkan, maka peneliti memberikan rekomendasi kepada pemerintah bahwasanya, sebaiknya pemerintah dapat menyusun strategi pengembangan wisata dengan membuat program kerja dan merencanakan beberapa pihak-pihak yang bisa diajak

untuk ikut andil bekerjasama mendukung pembangunan wisata di Pantai Lombang. Selain itu, pemerintah seharusnya bisa ikut andil dalam forum komunikasi pengelola wisata baik di daerah, provinsi maupun nasional agar pemerintah memiliki jaringan komunikasi di bidang pariwisata terkait dengan pembangunan pariwisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Antar, K., Daerah, P., & Gunungkidul, K. (2022). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*. 8(1), 45–64.
- Haris, R. A., Findriasih, & Hidayat, I. (2022). Pengembangan Wisata Bukit Tawap Leng-Leng dalam Perspektif Collaborative Governance. *Jurnal Public Corner Fisisp Universitas Wiraraja*, 17(2), 72–90
- Haris, R. A., Syafriyani, I., & Alfiyah, N. I. (2023). Collaborative governance in the development of local economic resources in Sumenep Regency. *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2), 189–199. <https://doi.org/10.26905/pjiap.v8i2.8998>
- Matthoriq, M., Zauhar, S., & Hermawan, R. (2021). Collaborative Governance dalam Tata Kelola Pariwisata-Desa (Studi Pariwisata-Desa “Bumiaji Agrotourism” di Kota Wisata Batu). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 007(01), 20–29. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2021.007.01.3>
- Molla, Y., Supriatna, T., & Kurniawati, L. (2021). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Kampung Wisata Praiijng Di Desa Tebara Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa*, 6(2), 140–148. <https://doi.org/10.33701/jipsk.v6i2.1790>
- Nashih Nasrullah. (2023). *Kepala Bappenas Suharso Soroti Tujuh Masalah Pariwisata Indonesia*. <https://news.republika.co.id/berita/r-t221l320/kepala-bappenas-suharso-soroti-tujuh-masalah-pariwisata-di-indonesia>
- Syaiful La Ode Islamy H., M. S. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*.
- Tol, J., No, C., Pos, K., & Barat, J. (2023). *DESAIN MODEL COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN DESIGN OF COLLABORATIVE GOVERNANCE MODEL IN HANDLING*. 9, 151–162.
- Undang-Undang No.10 Tahun 2009